

Analysis Of China's Belt And Road Initiative (BRI) Policy In The Concept Of Balance Of Power

Muhamad Akbar Yaumul Nahar

Article history:

Received: 2024-07-05 Accepted: 2024-08-25, Published: 2024-09-15

Abstract: The Belt and Road Initiative (BRI) or better known as the "New Silk Road" is one of the Chinese government's economic and foreign policies, aimed at connecting Eurasian economies with infrastructure, trade and investment. The BRI policy consists of two main components: the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road. China's Belt and Road Initiative (BRI) is a form of new economic power which in this case can be said to be the Image Community. Belt and Road Initiative (BRI) as China's effort to build hegemony in both the security and economic fields.

Keywords: Belt And Road Initiative (Bri), Balance Of Power, Image Community, China.

Pendahuluan

Pada era saat ini perubahan pengaruh kekuatan ekonomi berubah dengan masuknya era globalisasi pergeseran pengaruh terlihat dengan jelas ketika kekuatan ekonomi global mulai berpindah sedikit dari arah timur menuju barat, banyak negara-negara yang tumbuh menjadi negara adidaya baru. Salah satunya adalah negara China yang masuk menjadi negara yang kuat dengan perdagangan internasional dan muncul sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar. Perubahan ini mulai terlihat pada tahun pertama pemerintahan Xi Jinping. Dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi, salah satu kebijakan yang menjadi sorotan dunia internasional adalah Belt and Road Initiative (BRI) pada tahun 2013 yang bertujuan menghubungkan ekonomi Eurasia dengan infrastruktur, perdagangan, dan investasi. Kebijakan BRI terdiri dari dua komponen utama yaitu the Silk Road Economic Belt dan the 21st Century Maritime Silk Road (Syaiful Anam, 2019). Presiden Xi Jinping menggunakan Belt and Road Initiative (BRI) sebagai dasar kebijakan luar negerinya. Cina berharap untuk menggunakannya untuk meningkatkan koneksinya dengan lebih dari seratus negara dan organisasi internasional. Dibangun di sekitar jalan sutra bersejarah dan jalur maritim. Tujuan dari program ini adalah untuk memperkuat hubungan melalui investasi dalam infrastruktur, pembukaan koridor ekonomi dan transportasi, dan koneksi antara Cina dan negara lain secara fisik, finansial, digital, dan sosial.

Sementara Belt and Road Initiative (BRI) memiliki hubungan dengan rute perdagangan yang terkait dengan kebesaran historis China, inisiatif ini tidak terbatas secara geografis dan terus berkembang. Selain itu, peningkatan konektivitas sosial dan budaya antara negara mitra Belt and Road Initiative (BRI) dan Cina terkait karena infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) yang sangat penting, terutama dalam hal keamanan dan akses China ke sumber daya (Macaes, 2019). Beberapa praktik Tiongkok telah dikritik karena investasi

infrastruktur Belt and Road Initiative (BRI) awal. Salah satu masalah paling umum adalah penggunaan utang China dan jebakan pasar untuk membentuk kembali hubungan internasional yang menguntungkannya dengan menciptakan ketergantungan negara mitra Belt and Road Initiative (BRI) (Shattuck, 2018). Akibatnya, utang lebih dari setengah negara-negara yang terdaftar di bawah Belt and Road Initiative (BRI) adalah dinilai sampah atau tidak dinilai karena kelemahan ekonomi dan politik internal. Banyak dari negara-negara ini rentan terhadap ketergantungan dan kekerasan ekonomi karena mereka tidak memiliki banyak pilihan. Pinjaman Tiongkok biasanya tidak memiliki syarat untuk setidaknya 50% dari material, peralatan, teknologi, atau layanan yang berasal dari Tiongkok, berbeda dengan pinjaman dari lembaga keuangan multilateral yang menuntut akuntabilitas dan reformasi. Jelas bahwa China ingin menggunakan Belt and Road Initiative (BRI) untuk meningkatkan ekonomi, politik, dan keamanannya (Joana Eva, 2018). Dianggap sebagai cara China untuk bangkit secara damai, Belt and Road Initiative (BRI) dipuji sebagai potensi ekonomi anugerah bagi negara-negara mitra, atau dikritik sebagai taktik strategis untuk mendapatkan aset dan membangun kekuatan melalui paksaan diplomatik dan ekonomi (Jinping, 2017). Belt and Road Initiative (BRI) layak mendapat pujian dan kritik jika dilihat secara objektif. China telah memberikan pinjaman dalam situasi di mana pemberi pinjaman lain tidak akan terlibat. Karena beberapa negara Belt and Road Initiative (BRI) berada dalam posisi tawar yang lemah saat melakukan hal itu, ia menawarkan infrastruktur investasi yang mungkin tidak tersedia sebelumnya. Kemampuan untuk mengimbangi kepentingan Tiongkok dan kepentingan negara-negara mitra akan sangat penting untuk keberhasilan Belt and Road Initiative (BRI) dalam jangka panjang. Kemampuan negara Belt and Road Initiative (BRI) dapat mencapai keseimbangan politik dan ekonomi, serta kemampuan mereka untuk melindungi nilai mereka dari ketergantungan yang berlebihan pada China. Belt and Road Initiative (BRI) menunjukkan upaya strategis Tiongkok untuk mendominasi Asia Pasifik dengan meningkatkan pengaruhnya atas negara-negara di wilayah tersebut, mengatasi "Dilema Malaka", yang merupakan kerentanan jalur laut melalui Selat Malaka, dan mendapatkan akses ke atau membangun pelabuhan baru yang dapat digunakan untuk tujuan komersial dan militer. Selain itu, ini meningkatkan persepsi Tiongkok tentang tren Belt and Road Initiative (BRI) masa depan dan potensi nilai Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) (Storey, 2006)

Belt and Road Initiative (BRI) atau yang lebih dikenal sebelumnya “New Silk Road” merupakan salah satu kebijakan ekonomi dan luar negeri pemerintah China. Melalui program pembangunan infrastruktur yang luas dan menyeluruh di seluruh negara, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kekuatan ekonomi Beijing. Selain itu, perang dagang antara China dan Amerika Serikat, yang saling memperebutkan kekuatan politik dan ekonomi, menjadi alasan kebijakan ini dibuat. Kedua komponen Belt and Road Initiative (BRI) memiliki tujuannya masing-masing dalam menghidupkan dan mengembangkan jalur perdagangan internasional China. Komponen satu Silk Road Economic Belt yaitu sebagai jalur darat yang bertujuan dalam menghubungkan provinsi tertinggal bagian barat China dan Eropa melalui Asia Tengah. Sedangkan komponen kedua sebagai rute laut yang bertujuan menghubungkan daerah pesisir China dengan kawasan Asia Tenggara dan Afrika melalui jalur pelabuhan dan kereta api (Blancard, 2017). Belt and Road Initiative (BRI) merupakan kebijakan yang besar dan sangat ambisius dalam perdagangan internasional. Memulai jalur kedua komponen dalam Belt and Road Initiative (BRI) ini menciptakan sebuah jalan sutera besi bagi China dengan kepentingannya. Belt and Road Initiative (BRI) melintasi 3 benua yaitu Asia, Eropa dan Afrika.

Gambar 1 Wilayah Asia Tengah



Metode Penelitian

Untuk mengetahui bahwa Belt and Road Initiative (BRI) China merupakan salah satu bentuk kekuatan ekonomi baru yang dalam hal ini bisa dikatakan menjadi Image Community. Dalam penelitian ini penulis menggunakan konsep balance of power sebagai alat dalam mengetahui adanya bentuk perimbangan kekuatan yang dilakukan oleh China dalam perdagangan internasional. Sebelum kepada turunan konsep balance of power, ada kepentingan nasional yang merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam menjelaskan perilaku negara atau kebijakan luar negeri yang dilakukan. Mendefinisikan konsep kepentingan nasional sering dikaitkan dengan “power” atau kekuatan serta kekuasaan. Kepentingan nasional memberikan acuan yang jelas kepada para pengambil kebijakan dalam memutuskan tugasnya dan menjadikan petunjuk dalam menentukan kebijakan. Morgenthau mengakui bahwa definisi power akan berubah setiap saat (Burchill, 2005). Sejalan dengan konsep kepentingan nasional Morgenthau bahwa defines power akan berubah setiap saat. Ini membuktikan setiap pemerintahan memiliki pengambilan keputusan

berdasarkan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Melalui kepentingan nasional mencullah kebijakan yang dapat meningkatkan kekuatan negara dalam kancan internasional seperti Belt and Road Initiative (BRI) China dalam upaya menggenggam hegemoni dunia dalam perdagangan internasional. Menurut Brzezinski, troika hegemoni terdiri dari keuangan, kapasitas produksi, dan kekuatan militer. Determinan umum mengenai sumber kekuatan hegemoni termasuk unit mata uang, kekuatan militer, kepemilikan senjata nuklir, dan sebagainya (Yilmaz, 2010). Joseph S. Nye, yang menciptakan istilah "soft power", menyebutkan empat sumber kekuatan hegemoni: kepemimpinan teknologi, supremasi dalam militer dan ekonomi, soft power, dan pengendalian jalur komunikasi internasional (Yilmaz, 2010, p. 196). Terakhir, Susan Strange menekankan bahwa empat struktur keamanan, produksi, keuangan, dan pengetahuan, membangun hegemoni (Yilmaz, 2010, p. 195). Berdasarkan penjelasan tersebut, neorealisme dapat menjelaskan apa yang mendorong Tiongkok untuk membuat kebijakan Belt and Road Initiative (BRI). Pertama, setiap negara bertindak berdasarkan kepentingan nasional secara otomatis, yang berarti Tiongkok berusaha untuk memenuhi kebutuhan energinya dan mencari sumber energi alternatif. Kedua, neorealisme berbicara tentang distribusi kekuasaan, di mana setiap negara selalu berusaha menyeimbangkan kekuatan dengan negara lain. Dalam hal ini, Tiongkok berusaha mencari kepemimpinan di Asia dengan membiayai proyek HSR, yang bersaing ketat dengan Jepang. Ketiga, neorealisme berbicara tentang bagaimana negara berperilaku dalam sistem internasional yang menginginkan hegemoni di berbagai bidang. China mencoba mengambil alih hegemoni di bidang keamanan dengan menciptakan tatanan keamanan baru dengan meminta negara-negara untuk melepaskan AS dari urusan keamanan Asia. Di sisi ekonomi, pembentukan AIIB menantang tatanan finansial regional (ADB) dan global (World Bank dan IMF) serta aturan yang telah lama ada di institusi ini.

Terkait dengan distribusi kekuasaan dalam politik internasional, keseimbangan kekuatan dianggap sebagai salah satu upaya "realistis" yang dapat dilakukan oleh para aktor internasional untuk menjaga kestabilan sistem internasional yang bersifat anarki. Menurut Dougherty dan Pfalzgraff, empat prinsip dasar yang membentuk keseimbangan kekuatan adalah sebagai berikut: negara adalah aktor utama dalam sistem internasional, kebijakan domestik dan internasional dipisahkan dengan kebijaksanaan politik (Sheehan, 1996). Sementara Vattel mendefinisikan keseimbangan kekuasaan sebagai keadaan di mana kekuasaan dibagi kurang lebih sama di antara beberapa negara, Morgenthau mengatakan bahwa itu adalah keadaan di mana tidak ada negara yang memiliki kekuasaan mutlak dan mendominasi yang lain. Menurut daftar definisi yang dicatat oleh Dina Zinnes, keseimbangan kekuatan mengacu pada bagaimana kekuasaan didistribusikan di antara negara-negara dalam sistem internasional di mana tidak ada negara atau aliansi yang memiliki jumlah kekuasaan yang berlebihan (Sheehan, 1996). Melalui konsep balance of power yang dianggap sebagai salah satu upaya 'realistis' yang dapat dilakukan oleh

para aktor internasional dalam upaya menjaga kestabilan sistem internasional yang bersifat anarki. Definisi balance of power menurut Morgenthau mengacu pada suatu keadaan yang dimana dalam sistem internasional adanya kekuasaan yang terbagi kurang lebih sama diantara beberapa negara. Menurut Vattel balance of power adalah sebuah ketetapan mutlak bahwa tidak ada negara yang mendominasi dalam sistem internasional.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan data yang diperoleh Belt and Road Initiative (BRI) fokus terhadap jalur ekonomi sutra dan jalur sutra maritim abad 21 yang dimana Indo-pasifik. China melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) dapat memperoleh kekuatan hegemoni dunia yang belakangan lebih dengan hanya Amerika Serikat saja yang menjadi pusat hegemoni dunia. China mengeluarkan Belt and Road Initiative (BRI) adalah bentuk dari kepentingan nasionalnya yang mendukung dalam upaya menjadikan China menjadi poros hegemoni perdagangan internasionalnya. Melalui organisasi internasional yang diikuti oleh China dalam upayanya dengan membangun hubungan baik melalui Indo-Pasifik dengan tujuan bahwa ASEAN dan negara-negara Asia Tenggara masuk dalam lingkup kerjasama yang dibangun. Belt and Road Initiative (BRI) mampu membuat China menjadi poros kekuatan hegemoni baru saat ini dan bersaing dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat yang menjadi negara adidaya dalam kurun waktu yang lama menjadikan kekuatan Amerika dalam ekonomi berdampak besar. Lalu dengan adanya China melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) memberikan kekuatan yang sama dalam perdagangan internasional. Dan saat ini industri China sedang mengalami peningkatan yang pesat. Selain itu faktor domestik lah yang mempengaruhi China dalam mengeluarkan kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) yaitu mengatasi gejolak politik dalam lingkup domestiknya terutama gejolak yang ada di Xianjiang dengan memberikan jaminan pembangunan ekonomi. Faktor domestik lainnya terkait keamanan energi dimana terjadi peningkatan kebutuhan minyak dalam negeri sehingga Belt and Road Initiative (BRI) memungkinkan China mengamankan dan meningkatkan jalur sulai impor energi dari negara Asia Tengah.

Dengan menganalisa melalui balance of power ada asumsi melalui kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) tidak lepas dari ambisi China untuk mengambil alih peran sebagai pemimpin dikawasan Asia. Dimana upaya ini dalam segi negara-negara yang sudah menjalin kerjasama dengan china dalam proyek infrastruktur dikawasan Asia. Dengan melalui proyek kereta cepat yang bersaing ketat dengan jepang. Proyek High-Speed Railway (HSR) merupakan salah satu proyek yang dipromosikan oleh Belt and Road Initiative (BRI). High-Speed Railway (HSR) juga memiliki value-added yang sangat sejalan dengan upaya jangka panjang Beijing untuk mengekspor teknologi yang lebih canggih dan menyeimbangkan kembali ekonominya. Komitmen China untuk berinvestasi di proyek infrastruktur melalui Belt and Road Initiative

(BRI) merupakan peluang baik bagi perusahaan kereta api China untuk memperluas jaringan pasar ke luar negeri. Selain itu High-Speed Railway (HSR) juga merupakan simbol kemajuan teknologi China dimana China berhasil membangun jaringan High-Speed Railway (HSR) terbesar di dunia dan mengembangkan perusahaan kereta api yang kompetitif secara global. Melalui High-Speed Railway (HSR) sebagai salah satu proyek unggulan Belt and Road Initiative (BRI) dalam upaya mengambil pucuk kepemimpinan di Asia menjadikan China mampu menghilangkan pengaruh supremasi Amerika di wilayah Asia khususnya Asia Tenggara.

Kesimpulan

Belt and Road Initiative (BRI) sebagai upaya China dalam membangun hegemoni baik itu di bidang keamanan maupun ekonomi. Di bidang keamanan, China berusaha membentuk tatanan keamanan baru dengan mengajak negara-negara di kawasan untuk mengeluarkan Amerika Serikat dari urusan keamanan Asia. Sedangkan di bidang ekonomi, China membentuk Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang kemudian menantang institusi yang telah lama dibangun Amerika Serikat yaitu World Bank dan International Monetary Fund (IMF) maupun IFI yang sudah ada seperti Asian Development Bank (ADB). Melalui kekuatan ini China mulai menyaingi Amerika Serikat dalam pengaruhnya di tatanan global. melalui konsep balance of power Morgenthau jelas bahwa mengacu pada suatu keadaan yang dimana dalam sistem internasional adanya kekuasaan yang terbagi kurang lebih sama diantara beberapa negara. China menjadi salah satu negara yang memiliki pengaruh besar dalam Perdagangan Internasional, dengan kebijakan BRI, China mampu memberikan dampak yang besar dalam pengaruh sebagai negara yang besar. Dan China mulai membuktikan hal tersebut.

Daftar Pustaka

- Blancard, J.-M. F. (2017). China's Maritime Silk Road Initiative (MSRI) and Southeast Asia: A Chinese 'pond' not 'lake' in the Works. *Journal of contemporary China*, 330-331.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jinping, P. X. (2017). *Secure a Decisive Victory in Building a Moderately Prosperous Society*. Beijing: China Daily.
- Joana Eva, Q. L. (2018). *China's Belt and Road Initiative: Regional Outlooks for 2018*. Global Risk Insights.
- Macaes, B. (2019). *Belt and Road: A Chinese World Order*. London: Hurst.
- Shattuck, T. J. (2018). *How China Dictates the Rules of the Game*. E-Notes, Foreign Policy Research Institute.
- Sheehan, M. (1996). *The Balance of Power History and theory*. Routledge, 2-4. Retrieved from <http://rinslab.com/wp->

content/uploads/2017/05/Michael_Sheehan_The_Balance_of_Power_History_an_BookFi.pdf.

Storey, I. (2006). China's Malacca Dilemma. The Jamestown Foundation.

Syaiful Anam, R. (2019). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. 2.

Yilmaz, S. (2010). State, Power, and Hegemony. International Journal of business and Social Science 1, 3, 195.